

Integrasi Pelaporan Keuangan sebagai implementasi *Good Governance* pada Baitul Mal Masjid Baitul Arqam Sumampir

Uswatun Hasanah¹, Hijroh Rokhayati², Poppy Dian Indira Kusuma³

¹Universitas Jenderal Soedirman, uswatun.hasanah@unsoed.ac.id corresponding author

²Universitas Jenderal Soedirman, hijroh.rokhayati@unsoed.ac.id

³Universitas Jenderal Soedirman, poppy.kusuma@unsoed.ac.id

Abstrak

The weakness of the information system at the Baitul Maal Masjid Baitul Arqam (BM-MBA) is an obstacle in reporting activities and financial reporting that is transparent and accountable. Knowledge of good financial governance in accordance with the principles of good governance has not been owned by the BM-MBA manager. It takes the active role of academics to increase the knowledge of BM-MBA managers. The Community Service Program (PkM) aims to build synergy between the servants (UNSOED lecturers) and MBA takmir to improve BM-MBA services in the digital economy era. The target audience for this PkM program are BM-MBA managers and MBA congregations as recipients of BM-MBA services. The stages in the implementation of the PkM program began with pre-survey activities, formulating methods for solving partner problems, counseling and mentoring, finally evaluation.

Keywords: financial reporting, good governance, baitul maal, information system, information technology

PENDAHULUAN

Baitul Maal Masjid Baitul Arqam (BM-MBA) merupakan unit bisnis sosial yang didirikan sejak tahun 2016, yang berlokasi di Kompleks Perumahan Griya Satria 2 Jl. Kalisari Sumampir, Purwokerto Utara. Program-program kegiatan BM-MBA dijalankan oleh takmir dan jamaah MBA, yang merupakan warga kompleks perumahan Griya Satria Indah 2. Konsep ketakmiran sejak awal pendirian MBA, yaitu pada tahun 2004, adalah mengelola masjid sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Selama ini, BM-MBA telah menghidupkan perekonomian warga sekitar dengan menyelenggarakan berbagai program kegiatan. Berbagai program BM-MBA sangat variatif, diantaranya: mendukung pemberdayaan jamaah masjid melalui pengumpulan, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWaf), pentasarufan ziswaf berupa sembako gratis bagi masyarakat di sekitar

perumahan yang berhak, mengelola tabungan qurban, khitanan massal, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, mengelola toko sembako dan warung makan/catering, dan lain sebagainya.

Pada saat pandemi covid-19, beberapa pelaksanaan program-program BM-MBA mengalami kendala karena diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah. Oleh karena itu, takmir MBA mengambil langkah proaktif dengan mengedepankan kemaslahatan umat, seperti: membuka layanan jemput donasi atau via transfer bank, layanan belanja kebutuhan pokok dan herbal, konsultasi kesehatan online melalui grup *whatsapp* MBA, dan donor darah rutin setiap 3 bulan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mengantisipasi rantai penyebaran virus covid-19.

Capaian-capaian yang ditunjukkan oleh BM-MBA tersebut tidak didapat tanpa kendala dan masalah. Berdasarkan hasil diskusi dengan pengelola BM-MBA, beberapa kendala dan masalah masih ditemukan, yang tentu saja memerlukan solusi segera agar BM-MBA dapat berjalan dan berkembang lebih baik. Secara umum, permasalahan yang ada berkaitan dengan lemahnya sistem informasi keuangan BM-MBA. Selama ini, BM-MBA telah memiliki aplikasi keuangan sederhana, namun belum diimplementasikan secara optimal sehingga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel belum tercapai.

Masalah penting lainnya adalah minimnya pengetahuan pengelola BM-MBA tentang pengelolaan baitul mal yang profesional. Pengetahuan tentang tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance* belum dimiliki oleh pengelola BM-MBA. Hal ini tentu saja membutuhkan peran aktif dari akademisi untuk meningkatkan pengetahuan para pengelola BM-MBA.

Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk membantu pengelola BM-MBA untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dengan membangun sinergi antara pengabdian (Tim PKM UNSOED) dengan takmir MBA untuk meningkatkan layanan BM-MBA pada era ekonomi digital. Melalui program PKM ini, permasalahan-permasalahan dicoba diurai dan dipecahkan melalui 2 kegiatan utama, yaitu: peningkatan pengetahuan dan pengalaman mitra melalui penyuluhan dan pendampingan, serta digitalisasi sistem pengelolaan keuangan melalui pengembangan dan implementasi sistem informasi keuangan digital. Kegiatan-kegiatan tersebut diyakini dapat memberikan alternatif solusi bagi permasalahan BM-MBA karena digitalisasi ekonomi sangat diperlukan, terutama pada masa pandemi covid-19. Sementara itu,

ekosistem perekonomian digital berbasis syariah berpotensi untuk memajukan perekonomian bahkan dari lini terkecil.

Program PKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BM-MBA berupa peningkatan daya saing BM-MBA melalui perbaikan sistem informasi dan peningkatan kualitas dan jangkauan layanan BM-MBA. Selain itu, program PKM ini juga diharapkan dapat mendatangkan manfaat institusi, yaitu UNSOED, berupa meningkatnya citra UNSOED sebagai perguruan tinggi yang memiliki komitmen dalam peningkatan perekonomian daerah melalui penggunaan teknologi. Bagi civitas akademika UNSOED, program PKM ini diharapkan dapat memberikan peluang, terutama bagi dosen, untuk menerapkan hasil-hasil penelitian dan pengetahuannya dalam mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat.

METODE

Khalayak sasaran dari program PKM ini adalah para pengelola BM-MBA dan jamaah MBA sebagai penerima layanan BM-MBA. Mereka merupakan khalayak sasaran yang strategis karena keterlibatan mereka dalam pengembangan BM-MBA sangat besar. Tim PKM UNSOED berperan dalam mendampingi pada tahapan pengembangan sistem informasi BM-MBA. Tim PKM bekerja sama dengan mitra berusaha untuk mewujudkan BM-MBA yang amanah dalam mengelola filantropi dari masyarakat untuk disalurkan kembali bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama jamaah MBA serta warga sekitar MBA.

Secara umum, tahapan dalam pelaksanaan program PKM ini diawali dengan kegiatan pra-survei. Pra-survei dilakukan untuk menggali informasi, menganalisis situasi yang ada dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari mitra. Selanjutnya, tim PKM merumuskan metode penyelesaian masalah mitra. Metode pemecahan masalah pada program PKM ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Penyuluhan mengenai ekonomi digital dan tata kelola baitul mal dengan prinsip-prinsip *good governance*. Penyuluhan dilakukan kepada pengelola BM-MBA, jamaah dan warga sekitar MBA. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan pengelola BM-MBA, jamaah dan warga sekitar MBA tentang ekonomi digital dan tata kelola baitul mal yang baik.

2. Pengembangan sistem informasi untuk BM-MBA. Pengembangan sistem informasi dilakukan oleh tim PKM. Sistem informasi dikembangkan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan BM-MBA.
3. Bimbingan teknis penggunaan sistem informasi kepada pengurus BM-MBA. Bimbingan teknis dilakukan oleh tim PKM kepada mitra. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman teknis bagi mitra dalam menggunakan dan mengoptimalkan sistem informasi yang telah dikembangkan.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan PKM. Pelaksanaan kegiatan melibatkan mitra dan tim PKM. Monitoring terhadap kegiatan dilakukan terus-menerus untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan berjalan lancar sesuai rencana. Selanjutnya, pada akhir program PKM dilakukan evaluasi atas kegiatan-kegiatan PKM yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Governance/Tata Kelola Baitul Maal

Tata kelola merupakan hal penting pada organisasi dalam mengarahkan pengelola dan pengendali organisasi untuk meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (Firmansyah dan Devi, 2017). Sistem tata kelola organisasi berguna untuk mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, ekonomis dan produktif dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan dalam mencapai tujuan organisasi (Rahim dan Sahrullah, 2017; Huda dan Suwarjuwono, 2013). Dasar utama penetapan tata kelola organisasi yang baik menurut Islam mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Oleh sebab itu, konsep tata kelola organisasi menurut Islam harus mengintegrasikan peraturan yang berdasarkan pada syariah dan ajaran moral Islam (Sodiq, 2017). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keadilan/*fairness*, independensi (OECD, 1999; Fadilah dkk, 2018). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola islami, transparansi menunjuk pada shidiq, akuntabilitas menunjuk pada shidiq dan amanah, responsibilitas menunjuk pada amanah, tabligh, dan fathanah, sedangkan keadilan menunjuk pada shidiq dan amanah (Sodiq, 2017).

Akuntabilitas badan pengelola zakat dapat dilihat dari pelaporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan melalui internet (Rini, 2016). Pedoman Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infak, sedekah menetapkan bahwa item laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan hendaknya dipublikasikan melalui *website*. Prinsip akuntabilitas dalam mengelola Baitul maal dilakukan dengan cara menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab pengelola secara jelas dan selaras dengan visi, misi dan nilai dari organisasi. Lebih lanjut, kode etik digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas wewenangnya, semua pihak pengelola baitul maal.

Terdapat alternatif model konseptual mekanisme tata kelola pada lembaga pengelola zakat yang terdiri dari atribut kepemimpinan anggota dewan dan pimpinan organisasi institusi zakat, praktik transparansi dan pengungkapan, praktik mengelola pemangku kepentingan dan keadilan prosedural (Abioye, dkk, 2013). Atribut kepemimpinan institusi zakat meliputi transparansi dan pengungkapan. Transparansi didefinisikan sebagai karakteristik dari organisasi dan individu untuk terbuka dalam mengungkapkan dengan jelas informasi, aturan, rencana, proses dan tindakan. Transparansi diasumsikan dengan tiga dimensi yaitu transparansi informasi, partisipasi, pertanggungjawaban. Transparansi informasi menunjukkan tersedianya informasi relevan untuk seluruh pemangku kepentingan yang akurat, tepat waktu dan seimbang. Transparansi partisipasi menunjukkan keterikatan dengan pemangku kepentingan pada saat mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan pelaporan yang seimbang. Transparansi pertanggungjawaban menunjukkan kejelasan definisi pertanggungjawaban, yang menyebabkan orang-orang bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Konsep transparansi dalam mengelola baitul maal dilakukan dengan cara mempublikasi laporan keuangan, mengembangkan sistem akuntansi berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan teknologi informasi dan mengelola sistem informasi sebagai jaminan adanya kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif.

Pemangku kepentingan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan organisasi. Lebih lanjut manajemen pemangku kepentingan yang efektif perlu mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam organisasi, mengenali kebutuhan mereka dan mengurutkan pentingnya kebutuhan tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. Kerangka pemangku kepentingan zakat yang dikembangkan oleh Abioye (2013) mengklasifikasikan pemangku menjadi lima kelompok, antara lain:

- a. Pemangku kepentingan definitif, yang klaimnya sah dan mendesak dan yang memiliki kekuasaan untuk mengejar kepentingan mereka, seperti pemerintah dan dewan organisasi zakat.
- b. Pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan dan urgensi tetapi tidak memiliki legitimasi klaim, misalnya media.
- c. Pemangku kepentingan yang dominan, termasuk pengelola zakat dan pembayar zakat.
- d. Pemangku kepentingan tanggungan yang klaimnya sah dan mendesak tetapi tidak memiliki kekuasaan. Mereka adalah para penerima zakat.
- e. Pemangku kepentingan diskresioner, yang meliputi komite fatwa dan komite masjid.

Rerangka/model pemangku kepentingan zakat ini dapat digunakan para pengelola zakat untuk mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga pengelola zakat dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mereka.

Konsep tata kelola baitul maal selanjutnya adalah keadilan prosedural. Keadilan prosedural merupakan keadilan yang dirasakan dari prosedur dalam pengambilan keputusan, dan perlakuan yang dirasakan seseorang dari pembuat keputusan. Perspektif keadilan prosedural terkait dengan persepsi publik tentang keadilan proses pelaksanaan kekuasaan dan pembuatan keputusan. Persepsi positif tentang legitimasi dan keadilan otoritas kemungkinan akan mendorong perilaku yang lebih kooperatif dan menerima keputusan yang dibuat. Prinsip keadilan juga diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, melalui perlakuan adil yang setara terhadap muzakki seperti kesetaraan sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan muzakki.

Pelaporan Keuangan

Kesulitan yang dialami unit sosial dalam hal penyiapan informasi terpadu adalah sumber daya yang memiliki kemampuan dan alokasi waktu yang terbatas. Amanah yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan dapat dilaksanakan dengan penuh semangat dan bertanggung jawab, namun saat harus membuat laporan seringkali terkendala sehingga berlarut-larut tidak tersampaikan. Padahal para pemangku kepentingan sudah menunggu informasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Bagi para donatur kegiatan, pelaporan kegiatan yang tepat waktu menunjukkan integritas panitia pelaksana sehingga selalu menaruh kepercayaan untuk menitipkan donasinya kembali di masa yang akan datang.

Hal ini menunjukkan pentingnya sebuah sistem informasi pada suatu unit sosial bukan hanya bagi unit bisnis. Sistem informasi akan membantu penatalaksanaan kegiatan rutin dengan perlakuan yang sama antar waktu, siapapun pelaksananya. Jadi dalam kepanitiaan kegiatan bisa berganti-ganti personilnya, namun apabila sudah terbangun sistem informasi, pelaporan yang dihasilkan akan sama format maupun medianya sesuai kesepakatan pengurus. Terkait BM-MBA, sistem informasi yang dibangun dapat mengintegrasikan pelaporan semua program dalam 1 platform pelaporan yang disetujui takmir MBA. Kebutuhan informasi ini dapat dipenuhi melalui penerapan sistem akuntansi.

Menurut Warsono, Sagoro, Ridha, dan Darmawan (2010), terdapat beragam informasi yang dihasilkan dari satu siklus akuntansi, antara lain:

1. Informasi kinerja perusahaan; Akuntansi menghasilkan laporan laba/rugi (*income statements*) yang mencerminkan kemampuan UMKM dalam menghasilkan laba
2. Informasi posisi dana perusahaan; Akuntansi menghasilkan neraca (*balance sheets*) yang mencerminkan penggunaan dana berupa aset (disebut harta atau aktiva) dan sumber-sumber pemerolehan dana yang berasal dari utang dan ekuitas.
3. Informasi perubahan modal pemilik; Akuntansi menghasilkan laporan perubahan ekuitas (*statements of equity changes*) yang mencerminkan perubahan sumber pendanaan, terutama yang berasal dari ekuitas.
4. Informasi pemasukan dan pengeluaran kas; Akuntansi menghasilkan laporan arus kas (*statements of cash flow*) yang mencerminkan pemerolehan dan penggunaan aset utama berupa kas.

Berhubung BM-MBA bukan hanya melaksanakan fungsi sosial, melainkan juga fungsi bisnis yaitu sebagai unit penghasil pendapatan bagi masjid, maka unit bisnis ini dapat disetarakan dengan UMKM atau perusahaan dalam konteks sistem akuntansi. Informasi akuntansi yang dihasilkan pada dasarnya bersifat keuangan, namun dalam perkembangannya, dengan semangat keterbukaan dan pelaporan berkelanjutan, informasi akuntansi disajikan bersama interpretasi dan analisis atas laporan keuangan.

Pemangku kepentingan BM-MBA terdiri dari ketua takmir MBA beserta jajaran pengurusnya, Aghniya/Muzakki/Pemberi donasi, Dhuafa/Mustahik/Penerima donasi, warga masyarakat di lingkungan MBA, pemerintah daerah setempat

Integrasi Pelaporan

Era digital menuntut transaksi dan pelaporan dilakukan secara online. Hampir seluruh lapisan masyarakat memiliki telepon genggam berbasis android maupun komputer/laptop yang tersambung dengan jaringan internet. Dengan diterapkannya sistem informasi berbasis internet, hal ini dapat memudahkan pemangku kepentingan BM-MBA untuk memantau, menyetorkan, menyalurkan, melaporkan dan memberi informasi terkini lainnya terkait pengelolaan atau jalannya proses bisnis di BM-MBA.

Manfaat sistem informasi BM-MBA bagi pemangku kepentingan adalah kejelasan informasi mengenai pembayaran dan penyaluran filantropi, kejelasan tentang kinerja toko sembako, kejelasan informasi tentang pelaksanaan penyembelihan hewan qurban, kejelasan informasi mengenai pelaksanaan khitanan massal, kejelasan informasi tentang pelaksanaan donor darah dan pemeriksaan kesehatan, serah informasi mengenai agenda atau program baitul mal selanjutnya. Bagi pengurus BM-MBA, seluruh transaksi keuangan dapat terekam, dibuatkan bukti penerimaan yang instan dan terstandar, tanpa harus datang atau diantar ke tempat kediaman para dermawan, melainkan hanya via online.

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keadilan/*fairness*, independensi. Konsep transparansi dalam mengelola baitul maal dilakukan dengan cara mempublikasi laporan keuangan, mengembangkan sistem akuntansi berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan teknologi informasi dan mengelola sistem informasi sebagai jaminan adanya kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif.

Kemudahan bertransaksi dan mengolah data menjadi informasi keuangan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (internet) patut untuk dikembangkan dan selalu diadakan pemeliharaan agar tetap memberi manfaat bagi semua pihak. Hal ini membutuhkan sumber daya tersendiri untuk pengelolaannya. Keluaran dari sistem ini mampu membantu menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Harapannya pengelolaan BM-MBA lebih baik setelah dijalkannya sistem aplikasi BM-MBA berbasis internet sehingga mampu meningkatkan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dari jamaah MBA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Tim Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNSOED, takmir khususnya pengelola BM-MBA serta jamaah MBA atas partisipasi dan kerjasama selama kegiatan ini berlangsung hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abioye, M.M. (2013). Exploratory Study of Nigerian Zakat Institutions and Role of Governance on Zakat Payers' Trust, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
- Abioye, M.M.O., Mohamad, M.H.S. & Adnan, M.A. (2013). Antecedents of zakat payers' trust in an emerging zakat sector: an exploratory study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Vol. 4 No. 1, pp. 4-25.
- Fadilah, S., Maemunah, M., Hernawati, N., & Kuntorini, R. S. (2018). Implementasi Good Zakat Governance Pada BAZNAZ Se-Bandung Raya. *Kajian Akuntansi*, 19(2), 111-120.
- Firmansyah, I., & Devi, A. (2017). The implementation strategies of good corporate governance for zakat institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 2(2), 85-97.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 376-388.
- OECD. 1999. Business Sector Advisory Group on Corporate Governance.
- Rahim, S., & Syahrullah (2017). Model pengelolaan zakat perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 200-215.
- Rini, R. (2016). Penerapan Internet Financial Reporting untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 288-306.
- Roziq, A., Pratiwi, D. A., Irmadariyani, R., Wardayati, S. M., & Hisamuddin, N. (2021). Determining Variables the Level of Trust and Commitment of Muzaki in Paying Zakat. *Sch J Econ Bus Manag*, 52-57.
- Sodiq, A. (2017). Implementation Of Islamic Corporate Governance: A Case Study In BMT Nusantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung. *TIJAB (The International Journal Of Applied Business)*, 1(2), 106-112.
- Warsono, S., Sagoro, E. M., Ridha, A., Darmawan, A. 2010. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*. Yogyakarta: Asgard Chapter